

ABSTRAK

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Organisasi sektor publik dituntut untuk lebih efisien dalam penggunaan anggaran serta transparan dalam pertanggungjawabannya. Agar dapat memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan sistem anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan komponen pokok dalam penyusunan anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD, penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja serta dikembangkannya standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya sebagai alat evaluasi kinerja.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Analisis dan interpretasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman dalam mengevaluasi sistem anggaran kinerja yang diterapkan oleh RSUD dr. Soedomo Trenggalek, apakah telah sesuai dengan teori yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja manajemen.

Pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek, penyusunan dan pelaksanaan anggaran serta penggunaan kode rekening telah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Hanya saja biaya langsung atas pelaksanaan program dan kegiatan belum diklasifikasikan menjadi biaya yang terkendali dan tidak terkendali. Hal ini mempengaruhi obyektivitas penilaian kinerja manajemen. Kinerja manajemen yang diukur hanya terbatas pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator keuangan dan non keuangan.

Simpulan yang dapat diambil yaitu bahwa RSUD dr. Soedomo Trenggalek telah menerapkan sistem anggaran kinerja untuk menilai kinerja manajemen meskipun belum optimal. Agar dapat mengoptimalkan fungsi anggaran kinerja, maka perlu dilakukan klasifikasi biaya terkendali dan tidak terkendali pada belanja langsung. Selain itu penilaian kinerja hendaknya tidak hanya dinilai atas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga atas kinerja manajemen secara keseluruhan.

Kata kunci : Anggaran, Kinerja